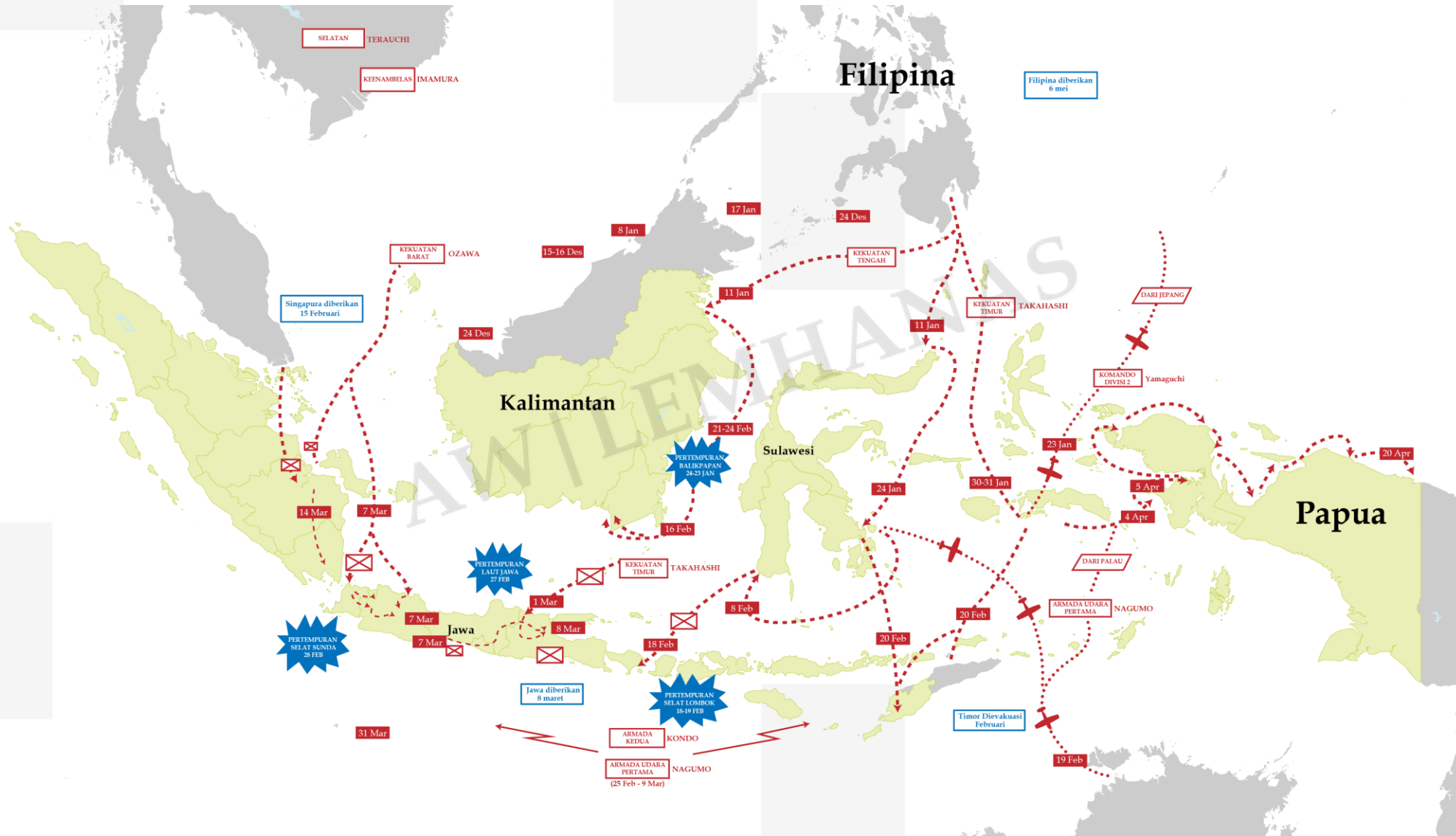




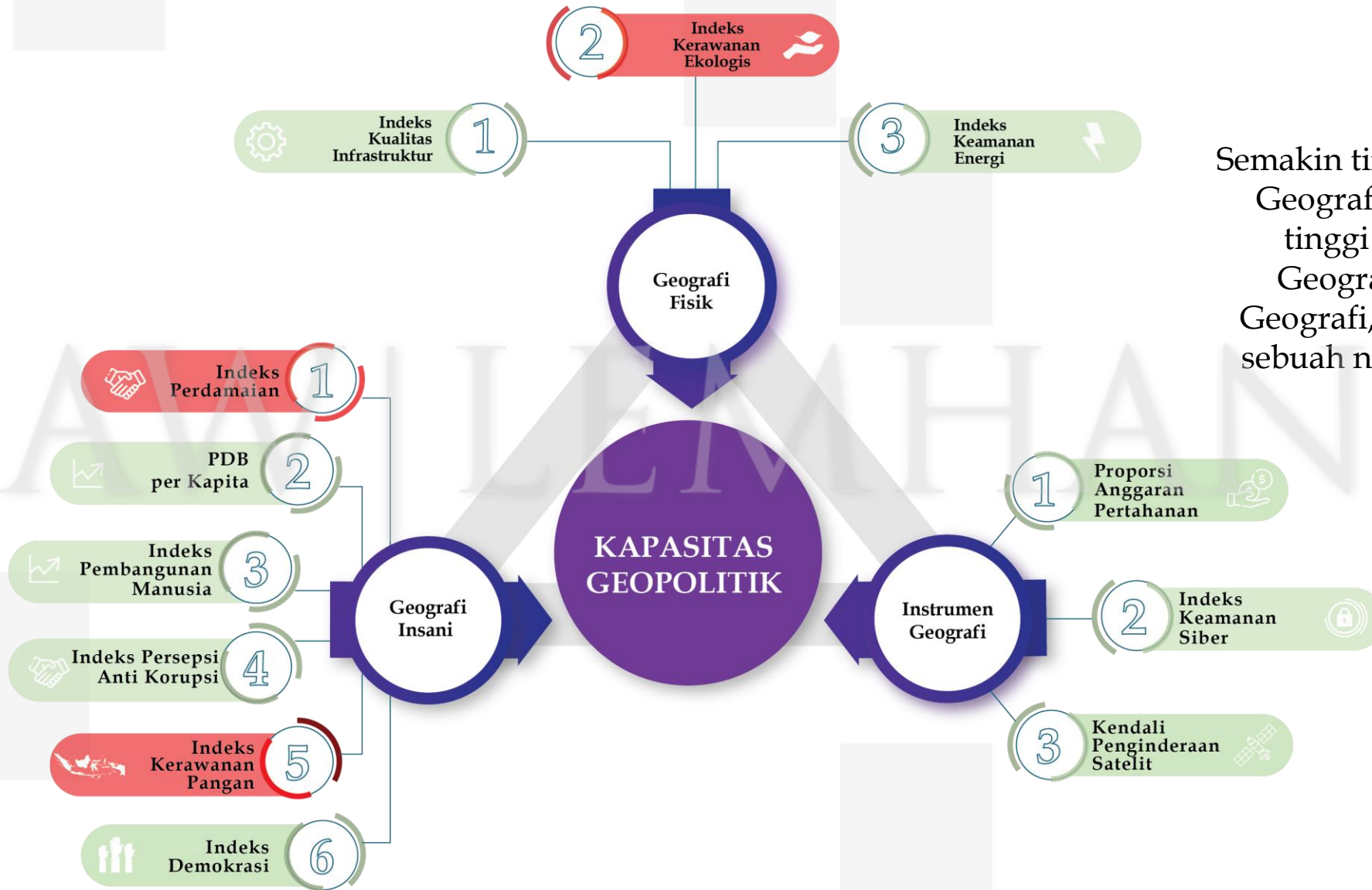
Geo V

Andi Widjajanto

Peta Serangan Jepang (Desember 1941-April 1942)



Metodologi Penghitungan Kapasitas Geopolitik*



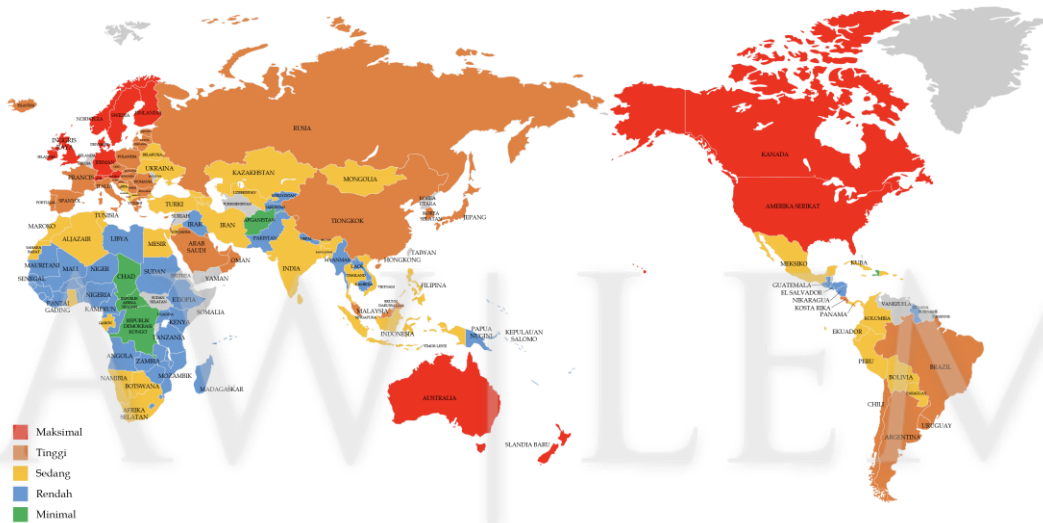
Semakin tinggi nilai indeks pada aspek Geografi Fisik, ditambah semakin tinggi nilai indeks pada aspek Geografi Insani dan Instrumen Geografi, maka kapasitas geopolitik sebuah negara akan semakin tinggi.

● Semakin kecil nilai indikator geografi, semakin tinggi kapasitas geopolitik suatu negara ● Semakin besar nilai indikator geografi, semakin tinggi kapasitas geopolitik suatu negara

Kapasitas Geopolitik Indonesia

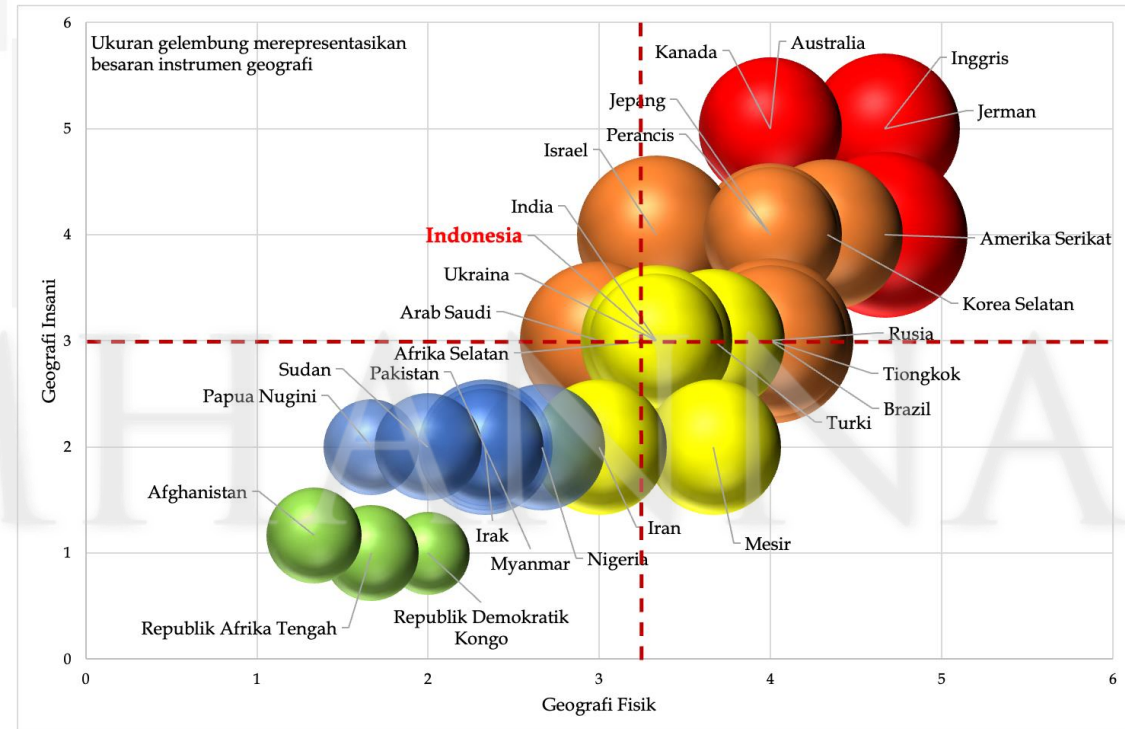


Pengukuran Kapasitas Geopolitik Global



Triangulasi Determinan Kapasitas Geopolitik

● Maksimal ● Tinggi ● Sedang ● Rendah ● Minimal



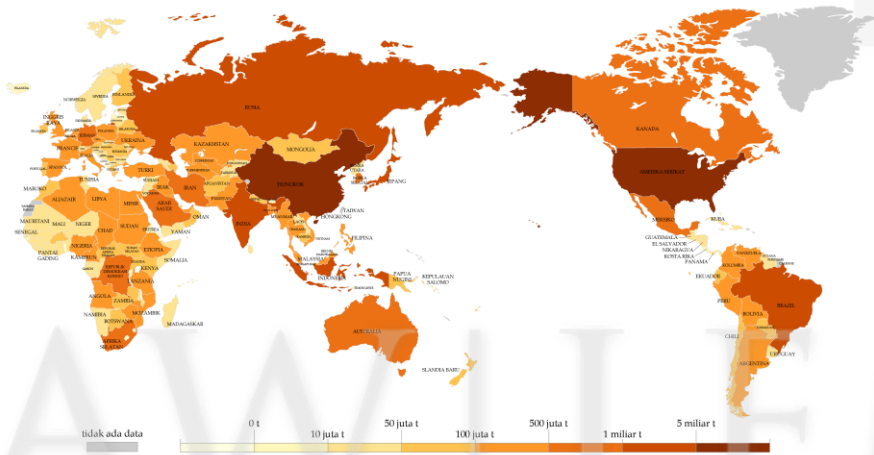
Grafik di atas menunjukkan hasil penghitungan kapasitas geopolitik merujuk indikator pada tiga dimensi geopolitik, yakni geografi fisik, geografi insani, dan instrumen geografi. Secara agregat, **Indonesia** memiliki **kapasitas geopolitik sedang**. Guna meningkatkan kapasitas Geopolitik menjadi maksimal, isu spesifik yang perlu diperbaiki antara lain: 1) **Geografi Fisik**, terus mendorong pembangunan berkelanjutan, seperti transisi energi, untuk meningkatkan kapasitas ekologi Indonesia mendukung kehidupan manusia di masa mendatang; 2) **Geografi Insani**, meningkatkan taraf hidup masyarakat di berbagai lini (pendidikan, ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan) serta meningkatkan kematangan institusional pemerintahan; dan 3) **Instrumen Geografi**, meningkatkan kemampuan relatif pertahanan Indonesia di semua mata dan mengintensifkan penguasaan teknologi, khususnya di bidang siber dan pemanfaatan ruang angkasa.



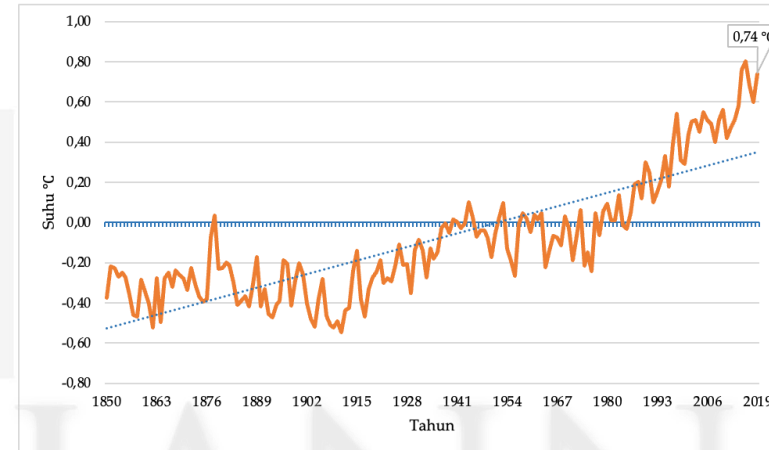
Ekonomi Hijau



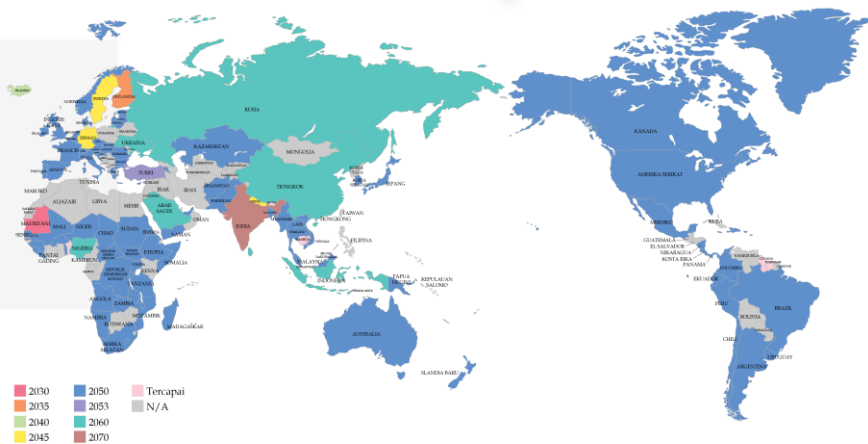
Emisi Gas Rumah Kaca



Rerata Anomali Suhu Tahunan



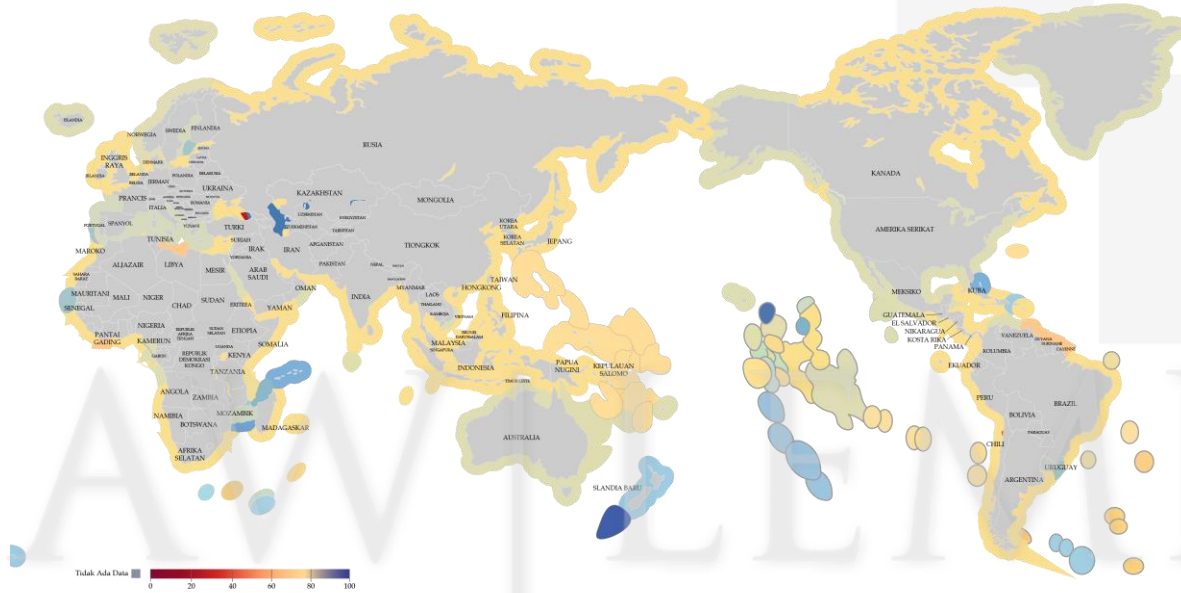
Target Netralitas Karbon



Visi “Ekonomi Hijau” adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat berlandaskan **keberlanjutan lingkungan** dan **inklusi sosial**. Keberlanjutan adalah kondisi ketika manusia dan alam berada dalam keselarasan produktif untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi dan lainnya, untuk generasi sekarang dan mendatang. Pencapaian visi ini terhambat oleh model pembangunan konvensional yang cenderung merusak alam, seperti melalui emisi gas rumah kaca yang mendorong pemanasan global. Data di atas menunjukkan anomali suhu dunia meningkat signifikan beberapa periode terakhir. Berdasarkan data *energi & climate intelligence unit*, Indonesia menjadi salah satu negara kontributor emisi gas rumah kaca terbesar di dunia.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah mewujudkan **netralitas karbon**, khususnya untuk meminimalkan laju pemanasan global. **Indonesia** sudah berkomitmen untuk mencapai netralitas Karbon **tahun 2060**. Komitmen ini relatif lebih rendah dari rata-rata global yang umumnya memiliki visi netralitas karbon di tahun 2050.

Ocean Health Index



Komponen Ekonomi Biru

Jenis Kegiatan	Jasa Laut	Industri	Pendorong Pertumbuhan
Memanen sumber daya hidup	Makanan laut	Perikanan	Ketahanan pangan
	Bioteknologi kelautan	Akuakultur	Permintaan akan protein
Mengekstraksi sumber daya non-hayati, membangkitkan sumber daya baru	Mineral	Farmasi, kimia	R&D kesehatan dan industri
	Energi	Pertambangan dasar laut	Permintaan akan mineral
	Air tawar	Minyak dan gas	Permintaan akan alternatif sumber energi
Perdagangan di dalam dan sekitar lautan	Energi terbarukan	Desalinasi	Permintaan akan air tawar
	Transportasi dan perdagangan	Pelayaran	Pertumbuhan perdagangan melalui jalur pelayaran; regulasi internasional
	Turisme dan rekreasi	Infrastruktur pelabuhan dan jasa	Pertumbuhan turisme global
Respons terhadap tantangan kesehatan laut		Turisme	Urbanisasi pesisir
	Monitoring laut	Pembangunan Pesisir	Regulasi domestik
	Penekanan karbon	Teknologi dan R&D	R&D teknologi laut
	Proteksi wilayah pesisir		Pertumbuhan di wilayah pesisir dan proteksi terhadap laut serta aktivitas konservasi
	Pengelolaan sampah	Karbon biru	
		Proteksi habitat dan restorasi	
		Asimilasi nutrisi dan limbah	

Implementasi melalui kerangka legal dan institusional:

- 168 negara anggota (termasuk Uni Eropa) telah meratifikasi UNCLOS 1982. Sebagai tambahan negara anggota juga telah meratifikasi dan menyetujui kesepakatan mengenai stok ikan nasional (91 negara anggota).
- Kesepakatan tentang ukuran status pelabuhan untuk mencegah dan menghapuskan praktik *illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing* telah berlaku sejak 2016.
- Setengah dari negara di dunia telah mengadopsi inisiatif spesifik terkait dukungan tentang nelayan berskala kecil. Secara global, komposisi rata-rata skor implementasi kerangka ini mengalami peningkatan dari 3/5 pada tahun 2018 menjadi 4/5 pada tahun 2020.

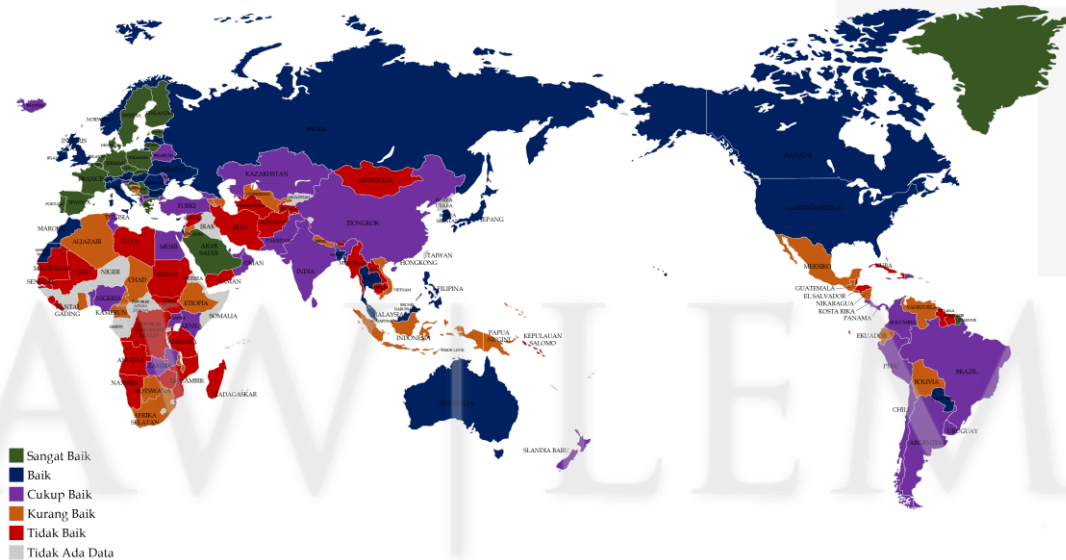
Beberapa capaian target SDGs poin 14 hingga tahun 2020:

- Pada tahun 2020, perluasan kawasan perlindungan laut mencapai 7,74% dari jumlah area pesisir dan lautan dunia (target 10%).
- Selama 2000 - 2020, persentase rata-rata area biodiversitas kunci (KBA) yang masuk dalam kawasan perlindungan bertumbuh dari 28% menjadi 44%.
- Data satelit menunjukkan bahwa ZEE memiliki tingkat klorofil yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2000-2004.

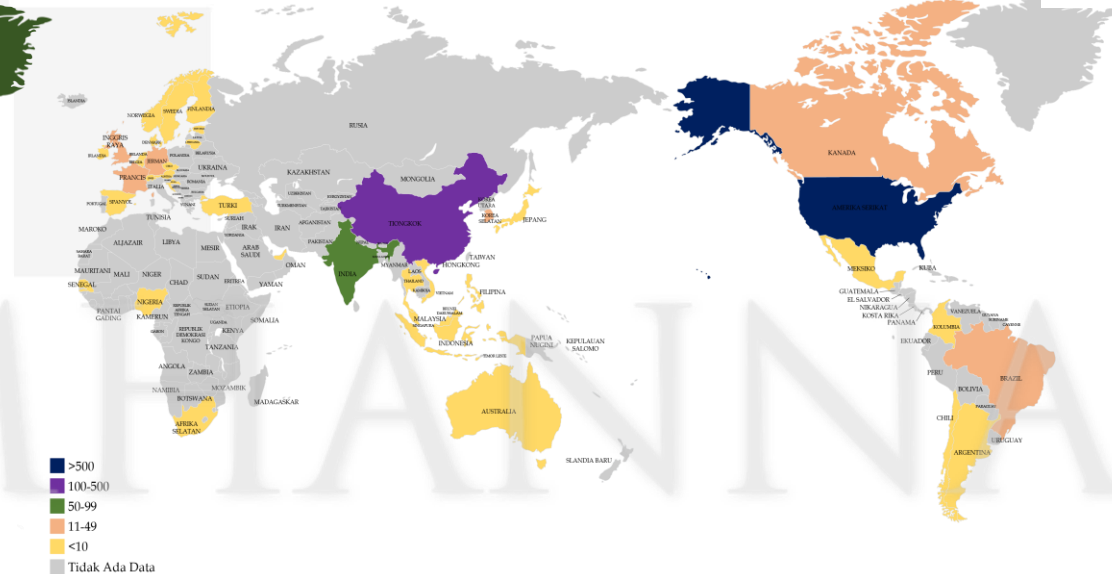
Beberapa Target SDGs poin 14 hingga tahun 2030:

- Tahun 2025, mencegah dan mengurangi secara signifikan polusi laut, secara khusus dari aktivitas di darat.
- Tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara paling tidak berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk manajemen berkelanjutan perikanan, akuakultur dan turisme.

Kapasitas Keamanan Siber



Persebaran Perusahaan Rintisan Unicorn



Peta Jalan Kerja Sama Digital

Mencapai konektivitas universal pada 2030	Mempromosikan barang publik digital dalam rangka menciptakan dunia yang lebih adil	Memastikan inklusi digital untuk semua, termasuk kelompok rentan	Memperkuat pembangunan kapasitas digital
Menekankan proteksi terhadap HAM dalam era digital	Mendukung kerja sama global dalam hal <i>artificial intelligence</i>	Mempromosikan rasa percaya dan keamanan dalam lingkungan digital	Membangun arsitektur yang lebih efektif bagi kerja sama digital

Peta Jalan Pembangunan Ibu Kota Negara



2020-2024

Pemindahan Tahap Awal

Membangun infrastruktur utama serta pemindahan ASN tahap awal.

2025-2035

Membangun IKN sebagai area Inti Tangguh

Membangun fase kota berikutnya seperti pusat inovasi dan ekonomi.

2035-2045

Pembangunan seluruh infrastruktur dan Ekosistem

Membangun infrastruktur dan ekosistem tiga kota, menjadi destinasi FDI nomor 1 di Indonesia.

2045

Reputasi sebagai "Kota Dunia untuk Semua"

Masuk dalam 10 kota layak huni terbaik, mencapai *net zero-carbon emission* dan 100% energi terbarukan.



IKN dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju. IKN bertujuan mengubah **Orientasi Pembangunan menjadi Indonesia-Sentris**, serta mempercepat **Transformasi Ekonomi Indonesia**.

Target Pembangunan IKN



Pembangunan Pertahanan Ibu Kota Negara



2020-2045

- Gedung Perkantoran, Sistem, Sarana dan Prasarana Pertahanan
- Pemandangan Personel dan Pegawai

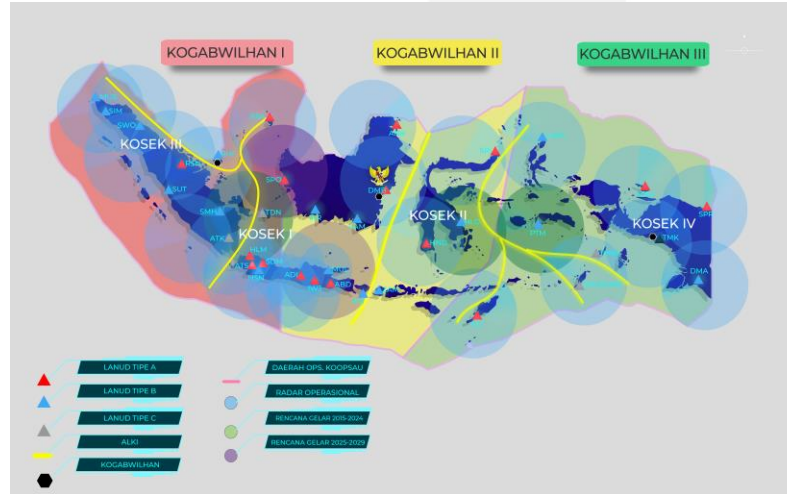
2020-2024

- TNI AD:
- Pembentukan satuan baru TNI AU:
 - Pembangunan Kohanudnas BIN:
 - Pembangunan Puskodal BSSN:
 - Pembangunan SOC IKN

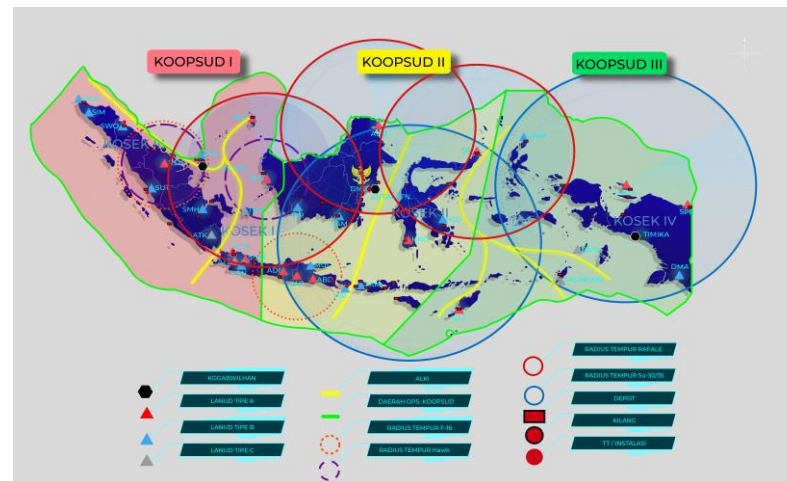
2025-2035

- TNI AD:
- Pembentukan Kodam Khusus
- TNI AL:
- Gelar Coastal Surveillance (Permukaan dan bawah Permukaan)
- TNI AU:
- Pembangunan Pangkalan Udara
- BSSN:
- Gelar SOC IKN

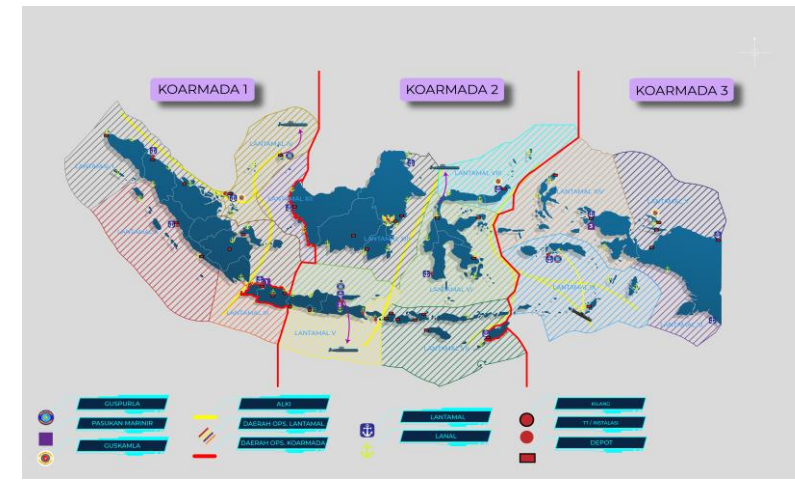
Kendali Ruang Dirgantara Nasional



Komando Operasi Udara Nasional



Komando Armada Republik Indonesia

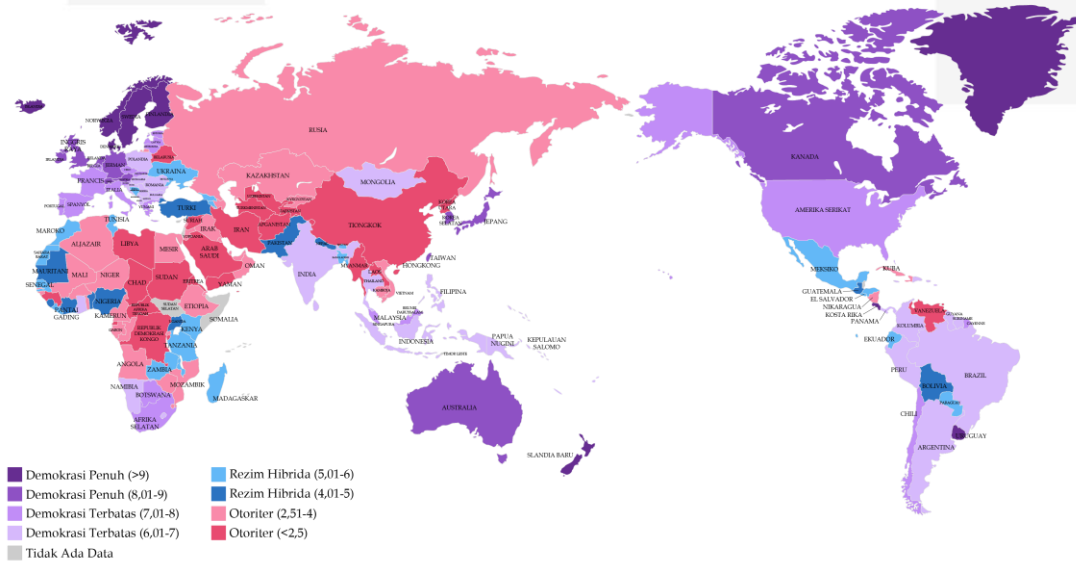


Pemindahan Ibu Kota perlu disertai dengan perubahan paradigma pertahanan. Selama ini, pertahanan Indonesia cenderung berfokus pada pertahanan dalam berbasis darat dengan mengandalkan strategi pertahanan mendalam (*indepth defense*). Paradigma ini dinilai tidak lagi optimal karena tidak sejalan dengan posisi geografis serta topografi Ibu Kota Nusantara. Secara geografis, Nusantara memiliki posisi relatif dengan negara tetangga serta dalam radius jelajah rudal negara tertentu. Ancaman mayoritas bersumber dari udara sehingga kapasitas *anti-access/area-denial* (A2/AD) di sekitar IKN perlu diperkuat. Selain itu, posisi yang lebih dekat dengan negara tetangga juga mendorong pertahanan laut Indonesia harus lebih mengedepankan prinsip *forward presence*. Selain itu, struktur topografi Nusantara tidak sejalan prinsip pembentengan. Pertahanan darat harus lebih diarahkan pada perbaikan mobilitas strategis.

Konsolidasi Demokrasi

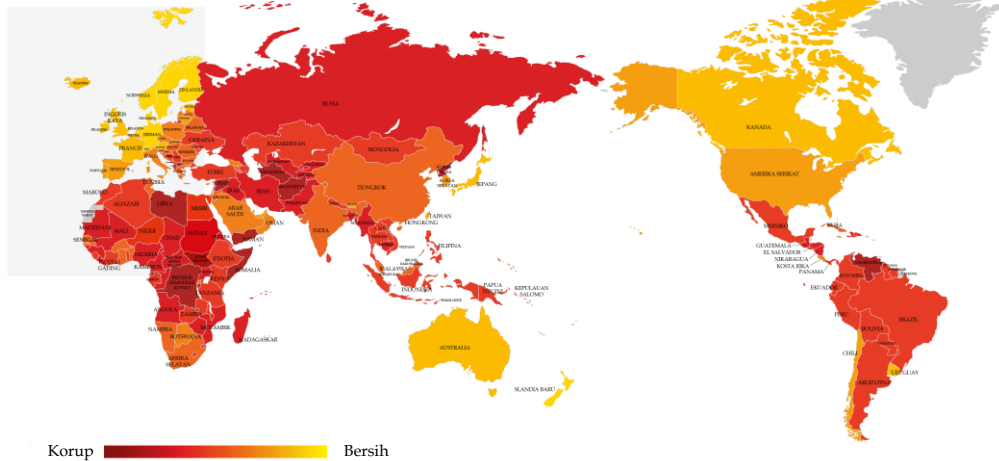


Indeks Demokrasi



Implementasi Demokrasi Indonesia masih belum sempurna. Kondisi ini tercermin dari pengukuran indeks yang menggambarkan tingkat kematangan Demokrasi global, yakni Indeks Demokrasi. Proses elektoral Indonesia relatif mumpuni tetapi masih lemah dalam aspek budaya politik. Poin yang menjadi perhatian adalah masih adanya tantangan mewujudkan kebebasan berpendapat serta masih tingginya perilaku koruptif di pemerintahan. Posisi ini juga tercermin dari pengukuran di tingkat nasional, mayoritas provinsi di Indonesia memiliki kualitas Demokrasi sedang.

Indeks Persepsi Anti Korupsi



Indeks Demokrasi Indonesia



Peta Jalan Demokrasi



7 Pemilihan Umum untuk Mewujudkan Kematangan Demokrasi di Indonesia

Berakhirnya kepemimpinan nasional Orde Baru menghadirkan perubahan besar dalam pelaksanaan Demokrasi Indonesia. Pada 2004, pelaksanaan Pemilu diselenggarakan secara langsung yang menjadi tahap awal pembangunan instalasi Demokrasi. Sejak Pemilu 2014, Indonesia mulai memasuki tahap konsolidasi demokrasi. Idealnya, kematangan demokrasi dapat tercapai setelah melalui tujuh pemilu demokratis.

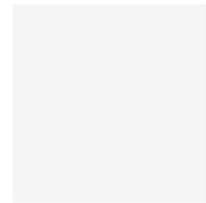
**INISIASI
DEMOKRASI**
1999
I

**KONSOLIDASI
DEMOKRASI**
2004
IV-V-VI

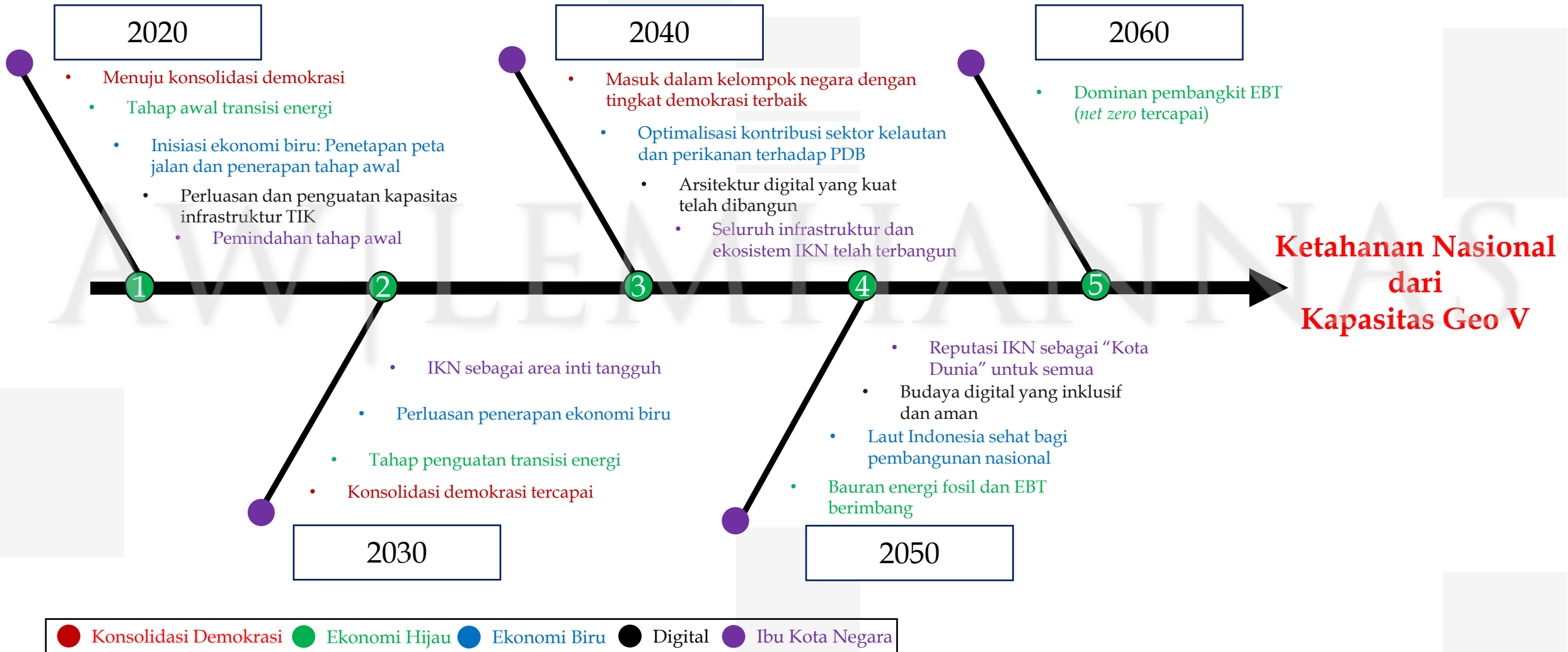
**DEMOKRASI
MATANG**
2029
VII

**INSTALASI
DEMOKRASI**
2004
II-III

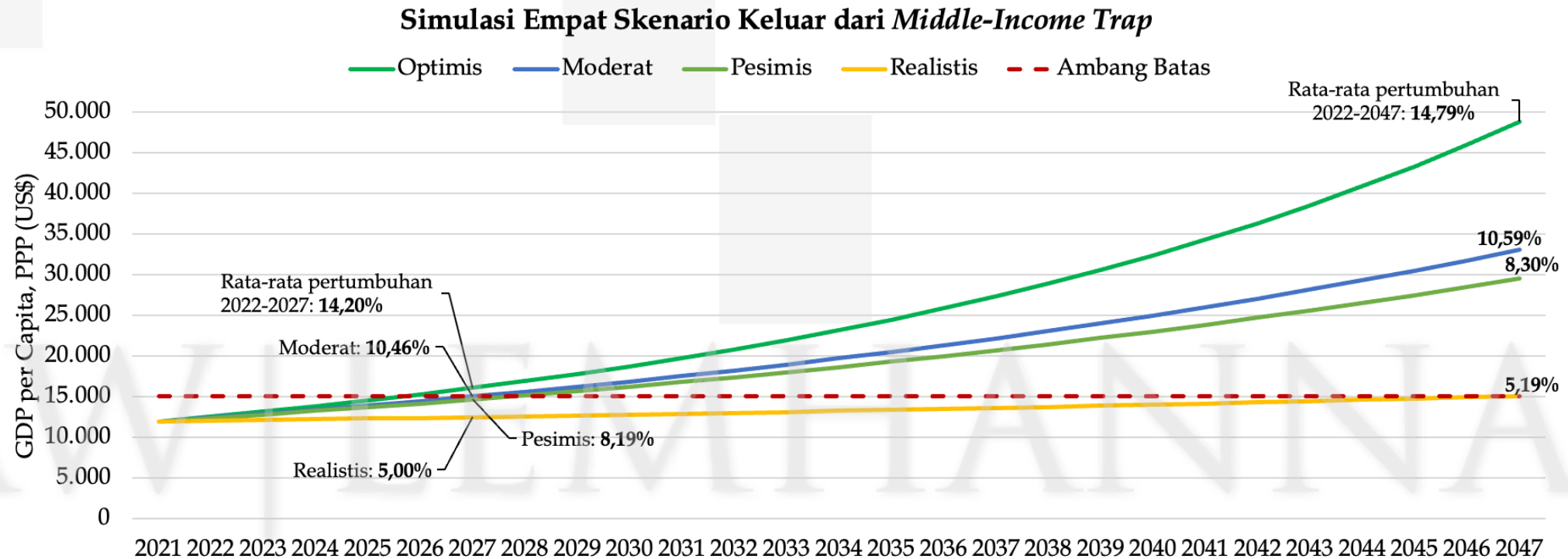




Pembangunan Ketahanan Nasional dari Kapasitas GeoV



Peningkatan Kapasitas Ekonomi



Sumber: LAB 45

Berdasarkan Eichengreen, Park, dan Shin (2013) dan Ayiar et al. (2013) dalam Pruchnik dan Zowczak (2017), ambang batas bagi perekonomian suatu negara untuk keluar dari *middle-income trap* adalah GDP per Capita, PPP (Constant US\$) sebesar US\$15.000. Dengan rerata pertumbuhan ekonomi setidaknya 10,46%, Indonesia dapat menjadi negara *high-income* pada tahun 2027. Sebagai catatan, untuk Indonesia menjadi negara *high-income* pada tahun 2027, dibutuhkan lonjakan harga komoditas yang lebih dari tren saat ini dan investasi sebesar Rp799,6 triliun per tahun.

Dalam skenario realistis, Indonesia baru keluar dari *middle-income trap* pada tahun 2047. Penyusunan skenario realistis, menggunakan angka pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir yakni sebesar 5,19%. Selain itu, penyusunan skenario turut melihat bahwa GeoV belum menjadi fokus Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Jika GeoV menjadi fokus Indonesia ke depan, terdapat potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi realistis. Meskipun dengan potensi ini, Indonesia masih sulit untuk keluar dari *middle-trap income* pada tahun 2027.

Oleh karena itu, berfokus pada kapasitas GeoV menjadi penting bagi Indonesia karena berpotensi membuat Indonesia keluar lebih awal dari *middle-income trap* yang berujung pada penguatan ketahanan nasional dan kapasitas geopolitik Indonesia. Terhadap potensi ini secara lebih mendalam, diperlukan kajian secara lebih lanjut.

Geo V

